

KONTROL SOSIAL HARIAN PALOPO POS DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI LUWU

Social Control of Palopo Pos Daily Newspaper in Realizing Good Governance at Luwu

Wahyuni Husain

Dosen Tetap STAIN Palopo. wahyunihusain8@gmail.com

Abstract

This research is aimed to analyse the trends of good governance rubric presented at Daily Palopo Post, and role of this media in realizing good governance in Luwu. The discussion of the research based on the question do Daily Palopo Post was able to become media control for local governance and also become mediator among the society, government party and also the private sectors. This research was performed by analyzing the trends of good governance rubric presented at Daily Palopo Post, and also the role of Palopo Post in realizing good governance during three months by using content analysis a descriptive method quantitative. The election of information technique was taken an entirety of population as sampel along May–June 2009. The research result shown that 1). The content of News daily Palopo Post on good governance was much more published the authority abuse based on governmental information source. That theme principle good governance also were published the accountability principle as implementation of government public responsibility; and 2) Daily Palopo Post has a role in dissemination of information and performed social control function especially as media which stimulated public awareness in order to enabled their role in controlling governance affairs toward better good governance management.

Keywords : *Social Control, Good Governance, Content Analysis,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan rubrik *good governance* ditampilkan di Harian Palopo Pos, dan peran Palopo Pos dalam mewujudkan *good governance* di Luwu. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh pertanyaan apakah harian Palopo Pos mampu menjadi media kontrol bagi pemerintahan lokal serta menjadi mediator antara masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis tampilan rubrik *good governance* selama tiga bulan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif analisis isi. Teknik pemilihan informasi mengambil keseluruhan populasi menjadi sampel dan dalam kurun waktu Mei-Juli 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Porsi pemberitaan harian Palopo Pos yang memuat isu-isu tentang *good governance* lebih banyak mengangkat tema penyalahgunaan wewenang. Demikian pula tema-tema yang berkaitan dengan prinsip *good governance* lebih banyak memunculkan prinsip akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban publik dari pemerintah; dan 2) Kehadiran Harian Palopo Pos menyebabkan kontrol media ini terhadap pemerintah di Luwu makin dekat, jadi kontrol media tidak hanya ada pada level pemerintahan pusat, akan tetapi juga pada level pemerintahan di daerah.

Kata kunci ; Kontrol sosial, Pemerintahan yang baik, Analisis Isi

Latar Belakang

Pada tahun 1998–1999, secara umum terjadi dua perubahan mendasar di Indonesia, yaitu desentralisasi dan demokrasi. Sebagai konsekwensinya, tata kerja pemerintahan lokal menjadi berubah. Demokrasi memberi ruang bagi pelibatan berbagai aktor dan masyarakat dalam proses pemerintahan, sementara desentralisasi memungkinkan kontekstualisasi pelaksanaan pemerintahan.

Seiring berjalannya proses menuju demokrasi, zaman kemudian berubah dan makin terbuka. Tuntutan untuk membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Jika masyarakat Indonesia menganut paham demokrasi, maka keterlibatan dan keterwakilan publik dalam proses-proses kebijakan harus dilaksanakan, karena pada dasarnya demokrasi dan *good governance* terkait dengan persoalan pengejawantahan kehendak dan kebutuhan publik ke dalam kebijakan (Hasrul Hanif, 2006: 3).

Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, akan menjadi prinsip yang memiliki arti yang penting bagi rakyat, sistem, maupun bagi aparat pemerintahan. Bagi rakyat, maka penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, maupun akuntabilitas akan memperkuat posisi rakyat pada tingkat lokal sebagai pemilik kedaulatan dan sumber legitimasi bagi sebuah proses pemerintahan pada tingkat lokal. Dengan demikian hal ini akan dapat menjadi titik tolak bagi munculnya sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Bagi sistem, maka penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan memberi fondasi bagi munculnya aturan main yang disepakati bersama serta berkembangnya sebuah pola interaksi antara berbagai aktor yang seimbang.

Meskipun demikian pentingnya prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan

akuntabilitas, dalam prakteknya terdapat berbagai masalah untuk aplikasinya dalam pemerintahan lokal. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai sumber dalam membantu penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, peranan media massa dibutuhkan sebagai medium penyampaian aspirasi masyarakat.

Pada era kebebasan pers sekarang ini, harus diikuti oleh mental dan sifat pemerintahan yang bersifat terbuka, mengikuti prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu, tuntutan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu hal yang mutlak. Dalam kegiatan pemerintahan, peran media, khususnya media massa sangat penting. Seperti yang dikemukakan oleh Denis McQuail (1994: 3) bahwa ada beberapa asumsi dasar mengenai pentingnya media massa, yaitu :

Pertama, media merupakan industri yang berubah dan berkembang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait;

Kedua, media massa merupakan sumber kekuatan–alat kontrol social;

Ketiga, media merupakan lokasi (atau forum) yang semakin berperan, untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bartaraf nasional maupun internasional;

Keempat, media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan; dan asumsi yang *kelima* adalah media telah menjadi dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.

Mengemban amanat sebagai kontrol sosial adalah hal yang tidak mudah, apalagi bila harus berhadapan dengan kekuasaan. Bila terjadi pemasangan terhadap media, hal itu telah mengindikasikan telah matinya demokrasi, sebab pemerintah tidak memberikan kebebasan bersuara dan berekspresi. Pers diharapkan sebagai pengelola ruang publik, dengan

memperlihatkan transparansi demi kemajuan demokrasi. Jadi media harus berada di tengah, yakni antara pemerintah dan rakyat, yang berarti juga bahwa media adalah yang menyebarkan berita tentang sepak terjang pemerintah dan media juga yang menunjukkan realitas dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari kebijakan. Di sinilah peran kontrol sosial media sangat dibutuhkan.

Suatu gambaran yang dilukiskan melalui data mengenai kecenderungan masyarakat membaca jenis media khususnya surat kabar pada umumnya adalah surat kabar lokal yang terbit secara rutin terutama masyarakat yang berdomisili di daerah atau desa-desa. Salah satu hasil penelitian yang termuat dalam jurnal PEKOMMAS yang dilakukan oleh Syarifuddin Akbar (1999: 78) di daerah Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa dari 29% penduduk yang membaca surat kabar, ada 27,5% yang membaca berita-berita lokal yang berkaitan dengan informasi mengenai daerah dan berita kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa media lokal sangat berperan penting dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan media lokal dalam memberi informasi kepada masyarakat, maka media ini dituntut untuk menjadi saluran komunikasi dari pemerintah kepada rakyatnya dan juga menjadi saluran komunikasi dari rakyat kepada pemerintah. Oleh karena surat kabar lokal terbit dan banyak memuat berita-berita lokal serta memiliki ruang lingkup yang sempit, mau tidak mau beritanya akan berkaitan dengan pengelolaan pemerintah daerah di mana surat kabar itu terbit.

Salah satu surat kabar lokal yang terbit adalah *Harian Palopo Pos* yang banyak memuat berita-berita yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di Luwu. Sebagai salah satu surat kabar lokal, *Harian Palopo Pos* dituntut untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan melakukan koreksi sosial, dan pemerintah daerah di Luwu

diharapkan terbuka menerima kritik. Namun pada kenyataannya, ada beberapa berita yang diinformasikan oleh surat kabar harian ini yang menuai protes di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyerangan dan pengrusakan di kantor *Harian Palopo Pos* pada Januari 2005 lalu.

Aksi pemukulan dan pengrusakan di kantor *Palopo Pos* saat itu diduga kuat berkaitan dengan pemberitaan *Palopo Pos* tentang pemberian pesangon kepada 35 mantan anggota DPRD, yang sejak awal November 2004 sering diberitakan. Tidak hanya itu, aksi kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi dimana salah satu wartawan *Harian Palopo Pos* yang bertugas di Kabupaten Luwu Timur dipukul, yang dilakukan oleh putra Ketua DPRD Lutim, pada 20 Februari 2005, yang diduga terjadi karena surat kabar ini banyak memberitakan sidang kasus korupsi senilai Rp 6,5 miliar lebih. Kejadian ini kemudian berlanjut dengan pengrusakan BKM Kantor *Palopo Pos* biro Malili, Kabupaten Luwu Timur oleh sekelompok orang tak dikenal.

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk melakukan penelitian apakah *Harian Palopo Pos* benar-benar menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Karena dengan kasus-kasus yang ada mengindikasikan bahwa surat kabar harian ini belum mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Luwu. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Kontrol Sosial *Harian Palopo Pos* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Luwu (Suatu Studi Pemberdayaan Saluran Aspirasi Komunitas Daerah).”

Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mencoba mengungkap masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kecenderungan rubrik *good governance* ditampilkan di Harian Palopo Pos?
2. Sejauh mana peranan surat kabar Harian Palopo Pos dalam mewujudkan *good governance* di Luwu ?

Kajian Konsep dan Teori

1. Komunikasi dan Media Massa

Berbagai paradigma muncul dengan bermacam pendekatan disiplin ilmu. Ada tiga paradigma utama pada pendekatan-pendekatan awal. Pertama, perspektif sistem, menekankan struktur dan organisasi semua komponen dari suatu sistem ketimbang berfokus pada satu atau beberapa elemen dasar yang dipilih oleh pendekatan reduksionis. Kedua, yakni perspektif interpretif, yang menekankan arti pentingnya makna dalam interaksi-interaksi sosial. Dan yang ketiga, perspektif kritis yang terfokus pada realitas sosial subjektif. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada aspek budaya populer seperti masalah-masalah gender.

Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, perkembangan ilmu komunikasi di abad 21 terus memunculkan perdebatan. Hal ini menuntut upaya yang lebih intensif dalam mengidentifikasi kaitan sistem komunikasi yang berlangsung melalui perantara atau medium, dan komunikasi tatap muka (McGrath & Hollingshead, dalam Kuper, 2000: 142).

Marshall McLuhan pernah mengemukakan bahwa kita hidup di dalam “desa global”. Media komunikasi modern memungkinkan jutaan manusia di seluruh dunia dapat berhubungan dengan erat hampir di setiap tempat di dunia. Goerge Gerbner (dalam Winarso, 2005: 53) menunjukkan pentingnya media dalam masyarakat :

Makna penting dari media komunikasi massa sebagai “pembuat publik” ini (kemampuan untuk menciptakan publik,

mendefinisikan isu-isu, memberikan syarat-syarat referensi umum, dan mengalokasikan perhatian dan kekuasaan) telah menimbulkan sejumlah besar sumbangan teoritis. Teori-teori media massa lainnya mempunyai akarnya dalam pemikiran politik, analisis sosial-ekonomi, dan ilmu literasi-artistik-historis.

Media mengarah kepada khalayak dan sesuatu yang lainnya. Denis McQuail menyatakan beberapa sudut pandang yaitu: Media adalah *windows (jendela)* yang memungkinkan kita melihat di luar lingkungan dengan cepat, *interpreters (penafsir)* yang membantu mengalami pengalaman, *platforms (panduan)* atau *carriers (pembawa)* yang membawa informasi, *interactive communication (komunikasi interaktif)* yang menyampaikan umpan balik khalayak, *signpost (papan penunjuk)* yang memberikan instruksi-instruksi dan arahan, *filters (penyaring)* yang menyaring bagian-bagian pengalaman dan memusatkan perhatian pada orang lain, *mirrors (cermin)* yang memantulkan dari kita kepada kita sendiri, dan *barrier (pengganggu)* yang menghalangi kebenaran. (McQuail, 1991:52–53).

Media massa adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Jenis media yang secara tradisional termasuk di dalam media massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan tabloid.

Dalam Cangara (2003:122) menyatakan jika khalayak tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Media dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu yang berbentuk ucapan (*the spoken words*), yang berbentuk tulisan (*the printed writing*), dan yang berbentuk gambar hidup (*the audiovisual media*). Selain itu media massa memiliki fungsi yaitu sebagai alat informasi, alat mendidik, alat menghibur, alat membimbing dan menyalurkan pendapat umum, alat menghubungkan, dan terakhir alat mengontrol dan menilik.

Fungsi Media Massa Bagi Masyarakat

Pengkajian mengenai fungsi-fungsi dan penggunaan media massa dapat menggunakan perspektif analisis makro dan analisis mikro. Perspektif makro memfokuskan pada maksud yang jelas dari komunikator massa dan menekankan tujuan yang jelas yang terdapat pada isi media. Di sisi lain perspektif mikro melihat melalui lensa pembesar pada para penerima isi, khalayak secara individual, dan menanyakan kepada mereka untuk melaporkan bagaimana mereka menggunakan media massa.

Winarso (2005: 28) dalam bukunya Sosiologi Komunikasi Massa, mengemukakan lima fungsi media massa yaitu sebagai berikut: 1) Pengawasan (*Surveillance*); 2) Penafsiran (*Interpretation*); 3) Penghubung (*Linkage*); 4) Penerusan Nilai-Nilai (*Trans-mission of Values*); dan 5) Hiburan (*Entertainment*).

Media Massa dan Konstruksi Realitas

Sejak tahun 1960-an, di Amerika Serikat diadakan studi mengenai opini publik, menunjukkan bahwa media massa merupakan referensi utama dalam menentukan sikap dan perilaku politik masyarakat. Mereka percaya bahwa isu-isu khusus yang ditampilkan media massa mempunyai dampak tertentu dalam

kehidupan sosial. Persoalan-persoalan yang dilansir media massa membentuk peta pemikiran (politik) dalam masyarakat. Austin Ranney dalam Redi Panuju (2002: 39) mempercayai bahwa ide-ide yang dilontarkan media massa seperti tentang apa yang dikatakan Richard Nixon dan Jimmy Carter mempengaruhi pendapat umum, seperti halnya yang ada dalam realitas politik (*The World of Politics is really like*). Austin Ranney menyebutnya sebagai “*Cognitive Maps*”.

Media massa dianggap memiliki pengaruh yang besar karena mempunyai kemampuan : Pertama, menciptakan kesan (*image*) dan persepsi bahwa sesuatu yang ditampilkan dalam layar visual maupun audio visual menjadi lebih nyata dari realitasnya (*reality*). Kedua, media massa mampu membuat liputan “apa yang terjadi” menjadi lebih nyata. Tentunya atas kemampuan reporter dalam memformulasikan “*what happens*” itu menjadi simbol-simbol verbal audio maupun audio visual. Media bisa menjadi refleksi atau gambaran lingkungan sekitarnya (Jeffrey Alexander, 1981: 35).

Ketiga, penelitian-penelitian “*Uses and Gratification*” yang biasanya terfokus pada efek individu, menemukan fakta bahwa komunikasi membangun makna ritual (*ritual meaning*) yang menggambarkan bagaimana orang secara bersama-sama dan bekerja sama secara terus menerus memakai makna tersebut. Dengan demikian, media massa membantu orang memvisualisasikan masyarakat-nya, perasaan-perasaannya, dan melakukan pembagian (*sharing*) terhadap seperangkat pemaknaan. Dominick dalam R. Panuju (2002:41) mengatakan bahwa media massa menjadi imajinasi simbolik tentang kesatuan nasional dan identitas nasional.

Keempat, media diyakini sejak lama menjadi semacam kanal yang berfungsi mengalirkan emosi dan kecenderungan destruktif psikologis lainnya menjadi gejala

internal (individu) yang wajar (normal). Seperti teori yang dikemukakan Dominick yang disebut teori Katarsis (*Chatartis Theory*), yang intinya mengatakan bahwa menonton pemandangan agresi dapat mengeluarkan perasaan-perasaan agresif yang dimiliki.

Berbeda dengan Teori Rangsangan (*Stimulation Theory*), yang menyatakan bahwa efek media massa adalah signifikan positif. Artinya bila seorang menonton film tentang kejahatan; sangat mungkin yang bersangkutan terangsang untuk melakukan kejahatan. Salah seorang pakar yang mendukung Teori Rangsangan ini antara lain Albert Bandura.

Baik Teori Rangsangan maupun Katarsis sama-sama menunjukkan bahwa media memiliki hubungan terhadap audiensnya. Positif atau negatif, konstruktif atau destruktif, pengaruh tersebut sesungguhnya ditentukan oleh faktor lain di luar faktor media. Faktor tersebut bersumber dari khalayaknya, yakni bagaimana persepsi khalayak terhadap keberadaan dari suatu media massa. Pengaruh media cenderung besar jika dianggap “kredibel” (dapat dipercaya). Demikian juga ketika apa yang disampaikan media bersentuhan secara positif terhadap preferensi sosial, maka media massa dibutuhkan sebagai penjaga harmoni sosial, memperkuat perasaan sosial.

2. Kontrol Sosial

Pada tahun 1950-an, Parson mendefinisikan teori kontrol sosial sebagai 'analisis atas proses-proses di dalam sistem sosial yang cenderung mengimbangi (*counteract*)tenden-si- tendensi penyimpangan. Kontrol sosial dengan demikian merujuk pada sebuah subsistem atau sebuah aspek remedial khusus dari hubungan sosial, bukannya efek permulaan dari hubungan sosial (Pansons dalam Kuper, 2000: 977). Adapun agen-agen kontrol sosial antara lain, polisi, penjara, psikiater, media massa, dan lain-lain.

Menurut Roucek, kontrol sosial terjadi dalam tiga bentuk, yaitu : 1) kelompok terhadap kelompok lain; 2) kelompok terhadap kelompok sendiri; dan, 3) individu terhadap sesamanya.

Definisi lain mengenai kontrol sosial, dikemukakan oleh Tomatsu Shibutani dalam Susanto (1989 : 107) sebagai berikut : ”*social control refers to the fact that human behavior is organized in response to expectations that are important to other people*”. (Kontrol sosial mengacu pada kenyataan bahwa perilaku manusia diatur untuk menanggapi atas harapan yang penting bagi orang lain). Shibutani menggunakan istilah kontrol sosial dalam arti luas. Pertama kata ini dipergunakan dalam arti yang umum, seperti mengarahkan (*direct*), menahan (*restrain*), mengatur (*regulate*) atau menguasai (*dominate*) perilaku orang lain atau kejadian-kejadian.

Bagi media massa sendiri, di dalam fungsi pemeliharaan sistem sedikitnya melakukan dua jenis kontrol informasi yang pelaksanaannya bisa bertumpang-tindih, yakni *kontrol feedback* dan *kontrol distribusi* (Donohue dalam A.S. Achmad, 2001:127). Dalam kontrol feedback, media massa memberikan feedback atau pengaturan kepada lain-lain subsistem dan atau kepada keseluruhan sistem. Ia berfungsi sebagai regulator, sebagai *early warner system*, atau sebagai korektor terhadap penyimpangan-penyimpangan norma sosial yang dominan. Ia melancarkan tekanan-tekanan korektif kepada subsistem-subsistem yang mungkin keluar dari keseimbangan fungsional dalam hubungannya dengan lain-lain subsistem.

Dalam kontrol distribusi, yang dapat terjadi secara sendiri maupun secara bersamaan dengan kontrol feedback, media massa melakukan fungsi pemeliharaan sistem melalui diseminasi selektif dan berbagai ragam tehnik-tehnik penyebaran maupun penyaringan informasi.

3. Good Governance

Secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Good governance menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku *governing*, yakni mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri (Alamsyah, 2006: 67). Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu PP Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance*: pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu : negara/pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat.

Teori Pendukung

Salah satu teori yang berhubungan dengan perkembangan media massa adalah teori normatif (McQuail, 1996:109). Dalam teori ini konsep hubungan dinyatakan secara jelas. Di samping itu, teori tersebut mengandung beberapa pandangan tentang harapan

masyarakat terhadap media dan peran seharusnya dimainkan media. Meskipun setiap bangsa memiliki teori normatifnya sendiri, namun masih terdapat beberapa prinsip umum yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi berbagai konsep khusus yang dianut oleh berbagai bangsa, yaitu: 1) Teori Otoriter; 2) Teori Pers Bebas; 3) Teori Tanggung Jawab Sosial; 4) Teori Media Soviet; 5) Teori Media Pembangunan; dan 6) Teori Media Demokratik-Partisipan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dan mengkombinasikan dengan teknik wawancara. Penghimpunan data dengan menggunakan teknik analisis isi suatu informasi dari suatu sumber data, yaitu surat kabar Harian Palopo Pos. Pembahasan mengenai informasi dalam surat kabar sudah sejak lama pula dijadikan objek dari studi-studi tentang komunikasi. Karena itu, Lasswell sebagai salah seorang pelopor dalam studi semacam ini telah menggunakan suatu teknik yang disebut *symbol coding* secara luas. Caranya adalah dengan mencatat lambang-lambang atau pesan secara sistematis untuk kemudian diberi interpretasi.

Populasi penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai *good governance*, yang diambil pada periode Mei-Juli 2009. Sebanyak 92 hari populasi yang merupakan tampilan informasi mengenai *good governance* (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas). Keseluruhan populasi akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk kumpulan informasi, dipilih secara *Purposive Sampling* terhadap semua informasi pada harian Palopo Pos dengan lama waktu tiga bulan dengan asumsi berita dalam jangka waktu tersebut sudah cukup mewakili. Penggunaan teknik *purposive sampling* digunakan dengan asumsi bahwa penulis hanya akan mengambil data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

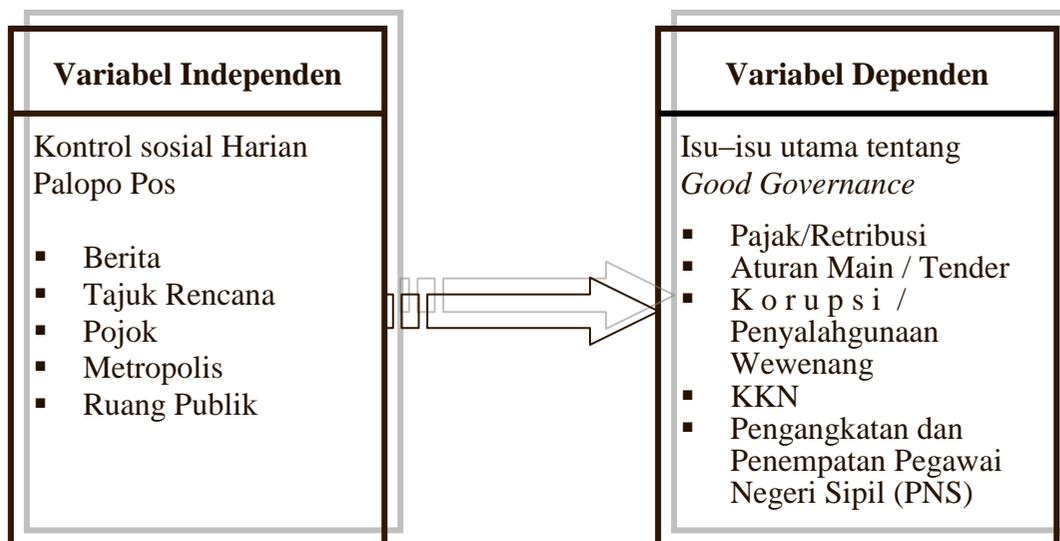
Disamping analisis isi, dilakukan juga wawancara dengan informan. Penentuan informan didasarkan pada asumsi bahwa informan tersebut dapat memberikan tanggapan mengenai kontrol sosial Harian Palopo Pos dalam mewujudkan *good governance*. Unit analisis dalam wawancara, yakni berbagai elemen masyarakat; Pemerintah Kabupaten/ Kota (Bupati dan Walikota yang ada di Luwu), Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat di bidang pendidikan, Tokoh Partai Politik, Tokoh Perempuan, Pengacara, Pemuka Agama, Pengusaha, Pemuda), dan LSM.

Teknik analisis data. Data yang terkumpul kemudian ditabulasikan berdasarkan berapa jumlah informasi, kategori tema, dan gaya penyampaian inti informasi seperti yang diuraikan. Unit pengukuran adalah sejumlah item berita, reportase, dan tajuk, mengenai masalah Human Trafficking. Metode pengukuran menyangkut frekuensi item dan persentase informasi. Tidak diukur dalam sentimeter dan dibandingkan dengan total sentimeter semua tampilan informasi, tetapi hanya menganalisis posisi tampilan informasi berdasarkan jenis informasi. Misalnya berapa persentase dan frekuensi informasi yang menjadi berita maupun non berita.

Studi ini menggunakan teknik analisis yang sudah lazim dalam teknik analisis isi media yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja, studi ini mencoba menggabungkan kedua analisis tersebut. Ada dua alasan kenapa kedua teknik ini digabung. *Pertama*, alasan bersifat teknis menyangkut pernyataan permasalahan studi ini relatif kompleks. Artinya jika hanya menggunakan salah satu teknik analisis saja tidak akan ditemukan jawaban yang signifikan. *Kedua*, alasan yang bersifat paradigmatis. Ilmu komunikasi merupakan *multi paradigma science* (Hidayat dalam Genda (2006;64)).

Untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh dengan objektifitas tertentu, peneliti menggunakan metode Intercoder reliability. Suatu cara pengujian yang dilakukan seorang kemudian dilakukan orang lain yang hasilnya diharapkan sama. Peneliti memakai dua orang Koder yang dianggap memahami bidang yang diteliti ini. Formula yang digunakan dalam melakukan *intercoder reliability* adalah formula Holsti.

Adapun variabel dari penelitian ini seperti digambarkan berikut ini:



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan populasi penelitian pada Harian Palopo Pos selama waktu penelitian dengan mengambil polulasi selama 3 bulan terbitan yakni bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009. Informasi kontrol sosial ditampilkan dalam bentuk berita, tajuk rencana, pojok, metropolis, dan ruang publik. Lima isu pokok informasi kontrol sosial dalam menciptakan *good governance* yang dipilih yaitu: isu tentang pajak/retribusi, aturan main/tender, korupsi/penyalahgunaan wewenang, KKN, serta pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lainnya. Dari kelima isu tersebut terdapat tampilan informasi sebanyak 252 judul. Pemilihan berita didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan,

yaitu; bertema kontrol sosial dan merupakan unsur dari *good governance* yang meliputi tiga unsur yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Jika berdasarkan pada kriteria tampilan informasi kontrol sosial harian Palopo Pos, maka dari 252 informasi dibagi lagi ke dalam jenis informasi. Pembagian jenis informasi berdasarkan pada bentuk tampilan informasi Palopo Pos yang ditampilkannya dalam beberapa rubrik antara lain: berita umum, berita/rubrik Metropolis, tajuk rencana, pojok, dan rubrik ruang publik. Berikut tabel informasi berita dan non berita:

Tabel
Jenis Informasi Kategori Berita dan Non Berita

Jenis Informasi		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berita	118	46,8	46,8	54,3
	Metropolis	19	7,5	7,5	58,7
	Tajuk Rencana	11	4,4	4,4	61,5
	Pojok	7	2,8	2,8	100,0
	Ruang Publik	97	38,5	38,5	
Total		252	100,0	100,0	

Sumber: Pengolahan Data Primer 2009

Wawancara pada penelitian ini kepada beberapa elemen antar lain: kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai serta pengamat bertujuan untuk menggali informasi dari pihak-pihak tersebut tentang pendapat mereka terkait bagaimana persepsi dan pandangan tentang peran dan fungsi Kontrol sosial Palopo Pos dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam menjalankan peran kontrol sosialnya, media harus berada pada posisi yang betul-betul netral dan proporsional. Posisi netralitas bukan berarti media harus menjadi oposisi pemerintah yang senantiasa menjadi lawan dari pemerintah, memberitakan sisi negatif dan mengkritik pemerintah. Bukan pula menjadi pilar hegemoni atas kepentingan

kekuasaan pemerintahan semata, menjadi corong kekuasaan pemerintah untuk semakin memperluas dan memperkokoh kekuasaannya. Dalam pemberitaan media harus melihat mana sisi positif yang harus diinformasikan secara meluas kepada masyarakat, dantahu pula kapan harus memberikan kritik dan pengawasan terhadap pemerintahan. Kontrol sosial dijalankan dengan memberitakan hal-hal terkait dengan pemerintahan bukan saja bertujuan untuk kepentingan pemerintah tetapi juga memberikan informasi untuk kepentingan kritik dan kontrol pengawasan terhadap pemerintah dengan memakai frame etika jurnalistik yang dianjurkan oleh Dennis Mquail antara lain: berita yang mengandung nilai kebenaran (*truth*) faktual, cover both side, sumber berita, serta cek dan richek.

1. Kecenderungan Rubrik *Good Governance* Ditampilkan di Harian Palopo Pos.

Kontrol sosial harian Palopo Pos dalam menciptakan *good governance*, yaitu menampilkan informasi dan berita tentang *good governance* dengan memakai tiga pendekatan prinsip *good governance* dalam penelitian ini antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga indikator *good governance* seperti disebutkan diatas, harian palopo pos pada tabel 18 memberikan porsi tampilan informasi nilai *good governance* masing-masing yaitu, informasi tentang transparansi sebanyak 60 (23,8%), Partisipasi 35 (13,9), dan informasi tentang Akuntabilitas 122 (48,4%).

Informasi tentang *good governance* terdapat dalam lima isu utama meliputi pajak dan retribusi, aturan main dan tender, penyalahgunaan wewenang, KKN, dan penempatan CPNS. Presentase kelima isu utama tersebut yaitu: Informasi yang menyangkut isu pajak dan retribusi 7 informasi (2,8%), isu tentang aturan main/tender sebanyak 17 (6,7%) informasi, isu tentang penyalahgunaan wewenang 13 (5,2%), isu tentang KKN 6 (2,4%), isu tentang pengangkatan dan penempatan CPNS 14 (5,6%) informasi, dan isu lainnya yang menyoal tentang *good governance* tapi tidak mengangkat isu utama yang dimaksud adalah sebanyak 195 (77,3%) tampilan informasi.

Dengan demikian, kecenderungan Harian Palopo Pos sebagai media lokal memiliki kepedulian terhadap terciptanya *good governance* oleh karena porsi tampilan informasinya mengedepankan porsi-porsi informasi yang memiliki nilai *good governance*.

Selanjutnya, memberikan penilaian terhadap kecenderungan harian Palopo Pos dalam menjalankan kontrol sosial untuk menciptakan *good governance*, sesuai dengan analisis isi (*content analysis*) sebagai metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini,

berarti untuk menilai kontrol terdiri dari tiga faktor kecenderungan dalam menampilkan berita *good governance* meliputi: Keakuratan isi berita, Ketajaman/ ketegasan isi berita, dan kelengkapan isi berita.

Keakuratan isi berita

Menilai keakuratan berita adalah menilai bagaimana tingkat ketelitian, kecermatan, dan ketepatan sebuah pemberitaan atau informasi *good governance* yang ditampilkan oleh media Palopo Pos.

Pertama, adalah ketepatan sumber informasi. Dalam tampilan informasi tentang *good governance*, yang bersumber dari redaksi sebanyak 16 informasi atau 6,3%, tampilan informasi dari pembaca sebanyak 88 atau 34,9% merupakan tampilan informasi yang bersumber dari redaksi jenis non berita yang ditempatkan di rubrik pojok dan tajuk rencana. Tampilan selanjutnya adalah informasi *good governance* yang merupakan kiriman penulis dalam bentuk opini sebanyak 7 informasi atau 2,8%. Yang paling banyak adalah informasi *good governance* disampaikan dalam berita yang bersumber dari wartawan Palopo Pos sebanyak 141 informasi atau 56%.

Kedua, wartawan dalam menyampaikan pemberitaan, menggunakan lagi sumber informan meliputi: sumber dari pemerintah kota/kabupaten sebanyak 56 kali (19,8%), sumber dari anggota DPRD sebanyak 20 kali (7,1 %). Sumber dari kepolisian 4 berita (1,4%), tokoh pendidikan 7 (2,5%), tokoh parpol 4 (1,4%), praktisi media 6 (2,1%), lembaga swadaya masyarakat 15 (5,3 %), tokoh pemuda 5 (1,8%), tokoh Perempuan 1 (0,4%), dan lain-lain 60 (21,3%).

Ketiga, kecermatan dan ketelitian sebuah informasi juga dilihat dari ada tidaknya sumber anonim untuk melihat lebih jauh apakah berasal dari sumber yang berkompeten atau tidak.

Ketajaman/ketegasan tampilan informasi

Ketajaman dan ketegasan dibuat untuk memisahkan tema-tema yang harus dimuat

dalam berbagai jenis tampilan sehingga memudahkan pembaca dalam memilih jenis yang disukainya.

Untuk memudahkan pembacanya, harian Palopo Pos dalam menampilkan tema *good governance* ditampilkan dalam bentuk tampilan informasi jenis berita dan non berita yang dimuat pada rubrik yang berbeda pula. Khusus untuk jenis berita ditampilkan di ruang berita umum sebanyak 118 kali atau 46,8% dan tampilan pada metropolis sebanyak 19 kali (7,5%), jadi secara keseluruhan tampilan informasi jenis berita 137 berita.

Jenis informasi non berita yang dimuat di harian Palopo Pos terdiri dari tiga jenis yaitu: Tajuk rencana, pojok, dan ruang publik terdapat 115 informasi. Informasi non berita yang paling dominan pada Harian Palopo Pos adalah Ruang publik yaitu sebanyak 97 informasi (38,5 %). Selanjutnya tajuk Rencana 11 informasi (4,4 %), dan Pojok 7 tampilan informasi 2,8%.

Ketajaman dan ketegasan lain yang ditempuh dalam menampilkan informasi *good governance* adalah pemilihan porsi pemberian informasi yang berbeda setiap harinya. Dengan mempertimbangkan pembaca Tampilan informasi kontrol sosial Palopo Pos tentang *good governance* pada hari senin rata-rata sebanyak 44 informasi (17,5%), pada hari selasa rata-rata sebanyak 57 informasi (22,6%), hari Rabu 37 kali (14,7), hari Kamis sebanyak 52 informasi (20,6%), Hari Jumat 54 (21,4), dan hari Sabtu hanya 8 informasi atau 3,2%.

Ketajaman dan ketegasan berita dapat pula dianalisis dari tingkat kesesuaian antar judul dengan isi berita. Dengan melihat judul yang ditampilkan pembaca sudah dapat mengetahui isi dan maksud dari tampilan sebuah informasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari harian palopo Pos dalam waktu penelitian diketahui bahwa terdapat 252 atau 96 % berita informasi yang memiliki keterkaitan atau kesesuaian antara judul dengan isi. Sedangkan hanya 10 (4%) tampilan informasi yang tidak memiliki kesesuaian antara judul dengan isi. Dengan

berdasarkan pada presentase tersebut, kesesuaian antara isi dan judul pada berita *good governance* yang ditampilkan oleh harian Palopo Pos tinggi.

Dalam menilai ketajaman dan ketegasan isi berita dapat dilihat dari muatan fakta. Frekuensi adanya pencampuran fakta dan opini dalam tampilan informasi harian Palopo Pos sebanyak 56 informasi atau (23,8%). Sebanyak 196 informasi (77,4%) informasi yang tidak mengandung unsur pencampuran fakta dan opini penulis, 1 tampilan informasi (0,4) yang tidak jelas dan lainnya 22 atau 8,7 %. Kecendrungan tampilan berdasarkan presentase tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tingkat netralitas harian Palopo Pos dalam menyajikan sebuah informasi cukup tinggi dengan melihat presentase unsur informasi yang ditampilkan sebanyak 77% yang tidak terdapat pencampuran fakta dan opini di dalamnya

Kelengkapan isi berita

Kelengkapan isi berita dinilai ada tidaknya *cover both side*. Kelengkapan dimaksudkan dengan *cover both side* adalah dengan melengkapi pemberitaan dari sudut pandang yang berbeda, antara pendapat yang berbeda tersebut diberikan ruang yang sama sehingga nampak berimbang. Kecendrungan *cover both side* yang ditampilkan harian Palopo Pos yaitu sebanyak 66 atau 26,2% informasi yang menggunakan *cover both side*, sebanyak 54 (21,4%) informasi yang tidak menggunakan *cover both side*, sebanyak 125 tampilan informasi (49,6%) informasi yang tidak perlu menggunakan metode *cover both side*, dan 7 informasi lainnya (2,8%) tidak jelas.

Untuk kelengkapan sebuah berita, penting pula melihat pemakain cek dan ricek. Dari tampilan informasi harian Palopo Pos sebanyak 252 item, terdapat 70 informasi atau 27,8% informasi yang memakai metode cek dan ricek dalam pemberitaan. Sebanyak 90 informasi atau 35,7% yang tidak ada. Sedangkan 88 (38,9%) informasi yang tidak perlu dilakukan

cek dan ricek dan hanya 4 informasi (1,6%) yang tidak perlu dilakukan cek dan ricek.

2. Peranan Surat Kabar Harian Palopo Pos Dalam Mewujudkan Good Governance di Luwu

Peran Pengawasan (*surveillance*)

Winarso (2005: 28) dalam bukunya Sosiologi Komunikasi Massa, mengemukakan bahwa peran media yaitu peran pengawasan (*Surveillance*). Peran pengawasan media adalah sebagai penjaga (*gatekeeper*). Fungsi pengawasan dapat dibagi ke dalam dua jenis yakni peringatan (pengawasan waspada) dan pengawasan instrumental. Pengawasan waspada terjadi ketika media menginformasikan kepada kita tentang adanya ancaman bencana, kondisi ekonomi yang buruk, banyaknya korupsi yang dilakukan di pemerintahan, atau serangan militer. Pengawasan instrumental yaitu ketika penyaluran informasi yang berguna dan membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Harian Palopo Pos, dalam melakukan peran dan fungsi pengawasannya melakukan kedua jenis instrumen tersebut dalam memberikan informasi tentang *good governance*. Untuk fungsi pengawasan tentu saja dalam memberikan informasi juga dilengkapi dengan data dan fakta mengenai arti kunci penting mengenai kejadian-kejadian tersebut. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada salah satu berita berjudul "Pesisir Pantai Memprihatinkan". Berita yang ditampilkan memeberikan peringatan mengenai dampak pengrusakan lingkungan. Kutipan berita tersebut sebagai berikut:

Ketua DPRD Luwu, H. Bahmid A Luluasa, sabtu 13 Juni lalu, usai melakukan pemantauan wilayah pesisir pantai kabupaten Luwu, sangat prihatin dengan kondisi wilayah pesisir dan pantai di Luwu. "Sepanjang mata kita melihat kondisi lingkungan di wilayah pesisir pantai sangat memprihatinkan. Mayoritas hutan bakau atau mangrove banyak yang rusak karena pembangunan areal tambak dan sejenisnya. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan,

sebab kondisi ini akan membawa bencana buat masyarakat," kata Bachmid, di sela-sela pantauannya.

(Sumber Harian Palopo Pos edisi 15 Juni 2009)

Berita yang ditampilkan juga memunculkan tanggapan dari pemerintah, yakni bupati yang memberikan tanggapan bahwa akan menyikapi akbat pembangunan di areal hutan mangrove. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap pemerintah berjalan dengan baik.

Peran dan Fungsi Sebagai Penghubung

Dalam menciptakan *good governance* tentu saja melibatkan banyak pihak yang harus saling mendukung antara satu sama lainnya dan meduduki posisi yang sama pentingnya, oleh karena itu media memiliki peran dalam menghubungkan pihak-pihak tersebut. Peran sebagai Penghubung (*Linkage*) disini adalah koran menjadi mediator bagi beberapa pihak untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang berasal dari unsur-unsur di masyarakat. Sebagai *linkage* dalam menciptakan *good governance* harian Palopo Pos menjadi mediator terhadap hadirnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta seluruh *stakeholder* yang ada di Luwu. Komunikasi berbagai pihak tersebut bertujuan untuk saling memberikan informasi, kritikan, pemikiran, maupun pengawasan demi terciptanya *good governance*.

Contoh peran harian Palopo Pos sebagai mediator bisa dilihat pada rubrik ruang publik seperti sms akan terjawab. Misalnya ada pertanyaan dari masyarakat, kemudian dijawab oleh pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dipertanyakan. Misalnya pada petikan sms dari warga sebagai berikut:

Yth opu wali, knp insentif guru ngaji n imam masjid blum dibagi tuk bulan januari-maret?

Sms tersebut kemudian dijawab oleh Kasi Pelayanan Depag Kota Palopo, seperti kutipan dengan judul "Masuk Dana Bantuan":

Untuk insentif guru ngaji dan imam masjid yang belum dibagi, itu sebenarnya, bukan lagi ditangani

Depag. Tetapi, ditangani perencanaan anggaran dan Kesra. Insentif guru ngaji dan imam masjid termasuk dana bantuan. Jadi belum terbayarnya insentif tersebut, akan dikoordinasikan bersama Rencana Anggaran Kesra. (Sumber Harian Palopo Pos edisi 22 Juni 2009)

Pada rubrik yang ditampilkan di atas mampu memberikan jawaban-jawaban dari sms yang masuk yang berasal dari sumber yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada rubrik ini.

Peran sebagai Rangsangan (Stimulati-on) bagi terciptanya partisipasi, trans-paransi dan akuntabilitas.

Teori Rangsangan (*Stimulation Theory*), yang menyatakan bahwa efek media massa adalah signifikan positif. Artinya bila seorang menonton film tentang kejahatan; sangat mungkin yang bersangkutan terangsang untuk melakukan kejahatan. Teori ini didukung pula dengan teori yang disampaikan Dominick yang disebut teori Katarsis (*Chatartis Theory*), yang intinya mengatakan bahwa menonton pemandangan agresi dapat mengeluarkan perasaan-perasaan agresif yang dimiliki.

Teori Rangsangan maupun Katarsis sama-sama menunjukkan bahwa media memiliki hubungan terhadap audiensnya. Positif atau negatif, konstruktif atau destruktif, pengaruh tersebut sesungguhnya ditentukan oleh faktor lain di luar faktor media. Faktor tersebut bersumber dari khalayaknya, yakni bagaimana persepsi khalayak terhadap keberadaan dari suatu media massa. Pengaruh media cenderung besar jika dianggap “kredibel” (dapat dipercaya). Demikian juga ketika apa yang disampaikan media bersentuhan secara positif terhadap preferensi sosial, maka media massa dibutuhkan sebagai penjaga harmoni sosial, memperkuat perasaan sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh koran harian Palopo Pos memiliki pengaruh positif terhadap terciptanya *good governance*. Peran ini dilakukan dalam mempengaruhi khalayak pembacanya dengan:

(1) Memberi tahu, yaitu harian Palopo Pos memberikan informasi tentang fakta yang terjadi di tubuh pemerintahan, kejadian-kejadian terkini, beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebutuhan mereka. Langkah ini untuk memusatkan perhatian masyarakat pada kebutuhan untuk berubah, kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metoda dan cara menimbulkan perubahan, dan jika mungkin, meningkatkan aspirasi. (2) Palopo Pos memberikan Pendidikan kepada rakyat agar memiliki pengetahuan melalui pemberitaan-pemberitaan yang akurat dan faktual, serta memberikan fakta dan data yang dibutuhkan oleh pembaca. (3) Membantu masyarakat berpartisipasi dalam hal proses pembuatan keputusan dengan menyediakan ruang publik di harian Palopo Pos, memperluas dialog dan menjaga agar informasi mengalir baik ke atas maupun ke bawah.

Ketiga langkah tersebut diatas, adalah berdampak pada rangsangan (*stimulation*) media terhadap pembaca untuk mendukung terciptanya *good governance*.

a. Peran sebagai Kontrol *Feedback*

Harian Palopo Pos sebagai koran lokal, memiliki peran yang baik dalam melakukan kontrol *feedback* di Luwu. Berbagai pengungkapan kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang ditampilkan di rubrik harian Palopo Pos merupakan tekanan yang diberikan kepada pemerintah agar pemerintah senantiasa melakukan koreksi terhadap penggunaan kekuasaannya.

Contoh yang dapat dianalisis salah satunya kutipan berita dengan judul “Citra DPRD Tercoreng” sebagai berikut :

Citra Lembaga DPRD Kota Palopo kembali tercoreng. Tiga anggota dewan yang mencairkan biaya SPPD, belakangan ketahuan tidak ikut studi banding. Mereka adalah Taming, Mochtar Dalla dan Wahida Karim. Menariknya, tiga anggota dewan yang tidak ikut pelesiran tidak pernah muncul di DPRD Palopo. Padahal dana perjalanan dinas Rp6 juta setiap anggota dewan sudah

dicairkan oleh bagian keuangan DPRD. (sumber Harian Palopo Pos edisi 22 Juni 2009)

Kontrol *feedback* dimaksudkan sebagai dampak tampilan sebuah informasi dapat menimbulkan efek dengan adanya koreksi-koreksi atau perbaikan diri atas penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh pemerintah, sebab jika tidak terdapat koreksi dan perbaikan kesalahan-kesalahan atau skandal atau penyelewengan akan terus berlangsung dan tentu saja sangat kontra produktif terhadap terciptanya *good governance*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rubrik *good governance* yang ditampilkan di harian Palopo Pos, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Porsi pemberitaan harian Palopo Pos yang memuat isu-isu tentang *good governance* lebih banyak mengangkat tema penyalahgunaan wewenang dengan mengandalkan sumber informasi dari pemerintah. Demikian pula tema-tema yang berkaitan dengan prinsip *good governance* lebih banyak memunculkan prinsip akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggung-jawaban publik dari pemerintah.
2. Harian Palopo Pos berperan dalam pemberian informasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial utamanya sebagai

media untuk merangsang kesadaran publik akan apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mampu meningkatkan peran mereka dalam mengontrol jalannya pemerintahan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2005.
- Genda, Silahuddin, *Analisis Isi Berita, Tajuk Rencana, dan Feature Kerusuhan Ambon di Harian Fajar dan Pedoman Rakyat*. Tesis Pascasarjana Unhas, Makassar, 2006.
- Kuper, Adam, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Terjemahan *Mass Communication Theory*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Panuju, Redi, *Relasi Kuasa Negara, Media Massa dan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Winarso, Heru P., *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- Yuliansyah, Achmad, *Menuju Masyarakat yang Belajar dan Bekerja*. Jakarta Pusat: PERSONA, 2006